

PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
TAHUN 2016-2021



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dengan baik. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 ini atas dasar Permendagri No 86 Tahun 2017.

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Dinas Pendidikan. Apabila dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Perubahan Rencana Strategis ini.

Akhir kata kami berharap mudah-mudahan Rencana Strategis ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Surabaya, 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya



Dr. Ikhsan, S. Psi. MM
Pembina Utama Muda
NIP.19690809 199501 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum	12
I.3. Maksud dan Tujuan	13
I.4. Sistematika Penulisan.....	14
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.....	15
II.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	15
II.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan.....	28
II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan.....	29
Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.....	45
Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	46
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.....	46
III.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	50
III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota.....	54
III.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Pendidikan.....	59
Bab IV Tujuan Dan Sasaran.....	60
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	60
Bab V Strategi Dan Kebijakan.....	67
V.1 Strategi dan Kebijakan.....	67
Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	73

VI.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Surabaya.....	73
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	103
Bab VIII	Penutup	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra SKPD	3
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran..	4
Gambar 1.3	Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA).....	6
Gambar 1.4	Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014-2019.....	9
Gambar 1.5	Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.....	11
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel T 1.1	Hubungan antara Visi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Visi Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.....	7
Tabel T 1.2	Hubungan antara Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	8
Tabel 2.1	Perubahan Nama Perangkat Daerah.....	15
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Fungsi.....	28
Tabel 2.3	Jumlah Lembaga Yang Dikelola Dinas Pendidikan.....	28
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.....	29
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan.....	35
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.....	48
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.....	49
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	50
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya.....	54
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya.....	57
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan.....	61

Tabel T-C.26	Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2020-2021.....	67
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Surabaya.....	73
Tabel 7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di bidang pendidikan diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan. Selain itu, perencanaan pembangunan di bidang pendidikan disusun untuk menjamin kualitas pendidikan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah menetapkan sembilan agenda prioritas, yang dikenal sebagai Nawacita. Sementara itu Nawacita meliputi, (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pencermatan kembali, amanat konstitusi, Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Surabaya serta kondisi terkini menjadikan sinergi pembangunan pendidikan sebagai pilihan yang memiliki alasan kuat. Berpedoman pada itu, disusunlah Rancangan Perubahan Awal Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Secara teknis, proses penyusunan dan penyajian rencana strategis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rencana strategis ini harus digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan pendidikan di Kota Surabaya.

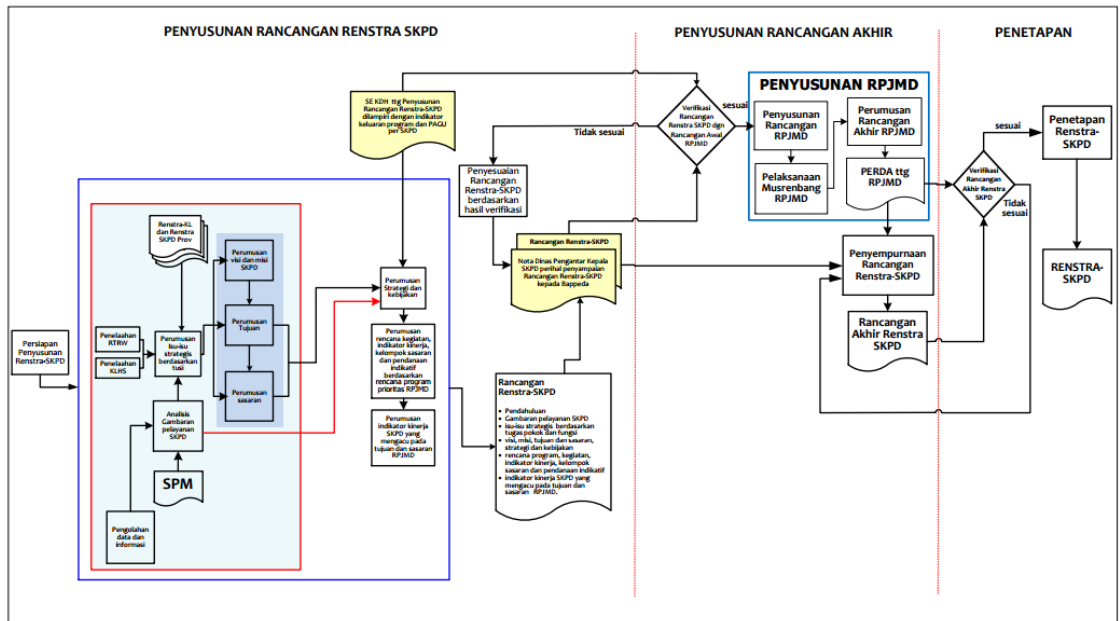
I.1.1. Pengertian Renstra Dinas Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dimaksud Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

I.1.2. Proses Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan

Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra SKPD



Tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD, meliputi:

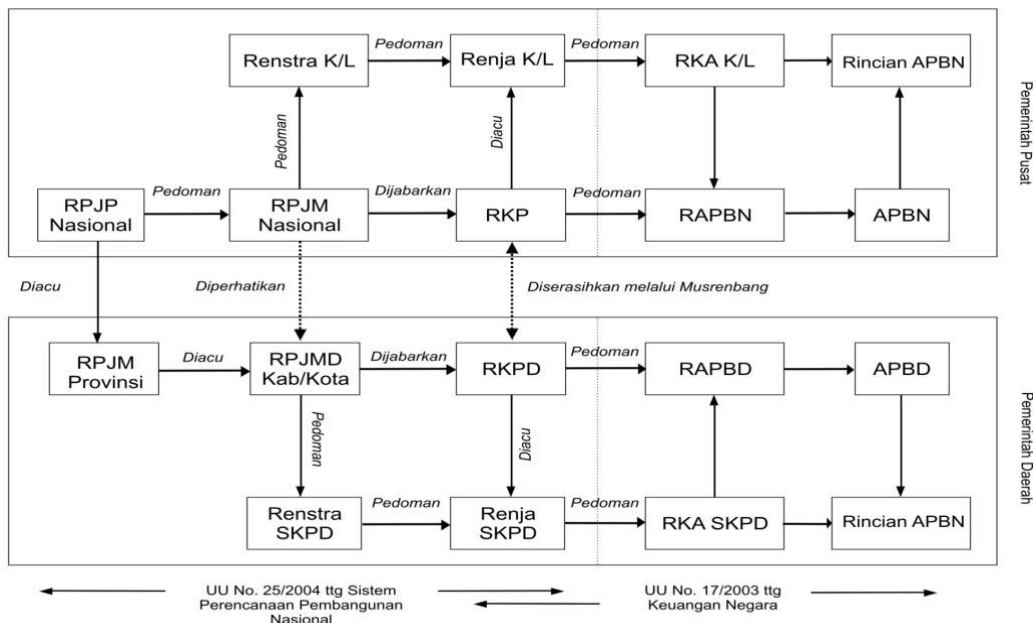
- 1) Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, meliputi:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;

- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

I.1.3. Keterkaitan antara Renstra Dinas Pendidikan dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Gambaran tentang hubungan antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat sebagaimana ditunjukkan gambar 1.2

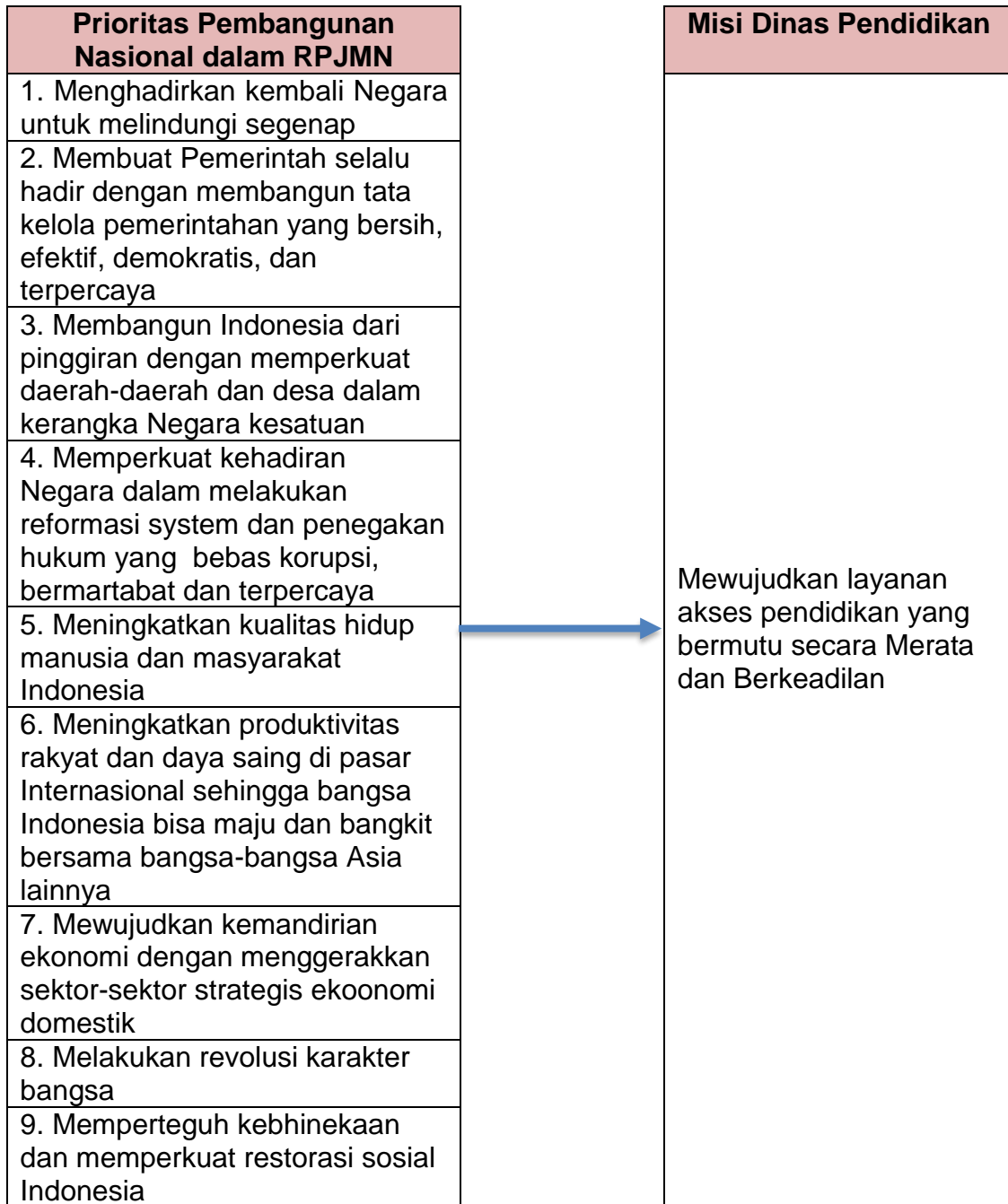
Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



RPJP nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJM provinsi. Sedangkan RPJMD kota mengacu pada RPJM nasional. RPJMD kota

dijabarkan oleh Badan Perencanaan Kota dalam bentuk RKPD. RKPD ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Dari Rancangan APBD akan disahkan untuk menjadi APBD. RPJMD kota ini menjadi pedoman dalam penyusunan renstra SKPD. Selanjutnya renstra akan dijadikan pedoman dalam penyusunan renja SKPD. Renja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA. RKA dan APBD akan dijabarkan dalam rincian APBD.

Keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:



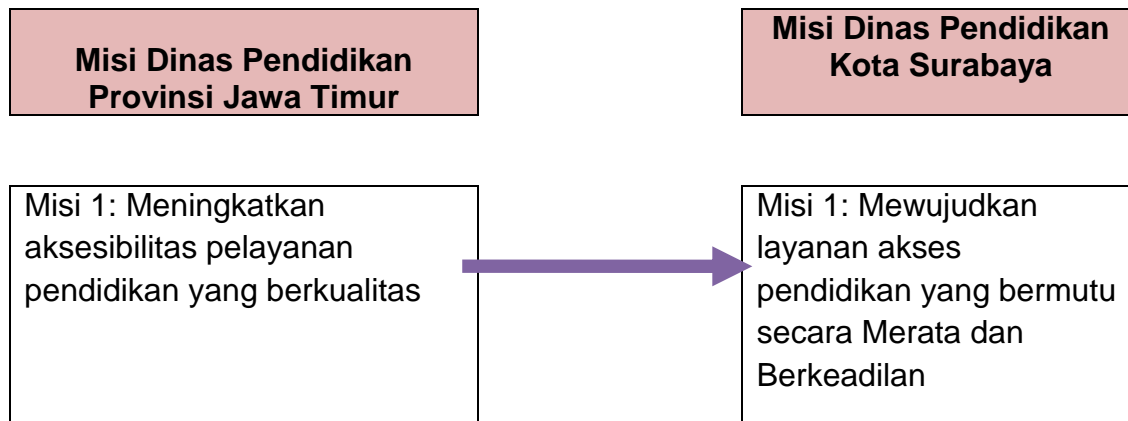
Gambar 1.3
Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWACITA)

Tabel 1.1
Hubungan antara Visi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
Tahun 2016-2021
dengan Visi Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2015-2019

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019	Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021		
	Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Menghasilkan Insan Indonesia <u>Cerdas</u> dan <u>Kompetitif</u> (Insan Kamil/Insan Paripurna)	Menjadikan Surabaya Sebagai <u>Barometer</u> Dan <u>Inspirator</u> Pendidikan Nasional	Barometer	Barometer yang dimaksud adalah pendidikan di Kota Surabaya dapat dijadikan standar penilaian ideal pendidikan yang ada di Indonesia.
		Inspirator	Inspirator yang dimaksud adalah bahwa pendidikan di Kota Surabaya dapat menjadi inspirasi pembangunan pendidikan di kota-kota lain di seluruh Indonesia.

Tabel 1.2
Hubungan antara Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

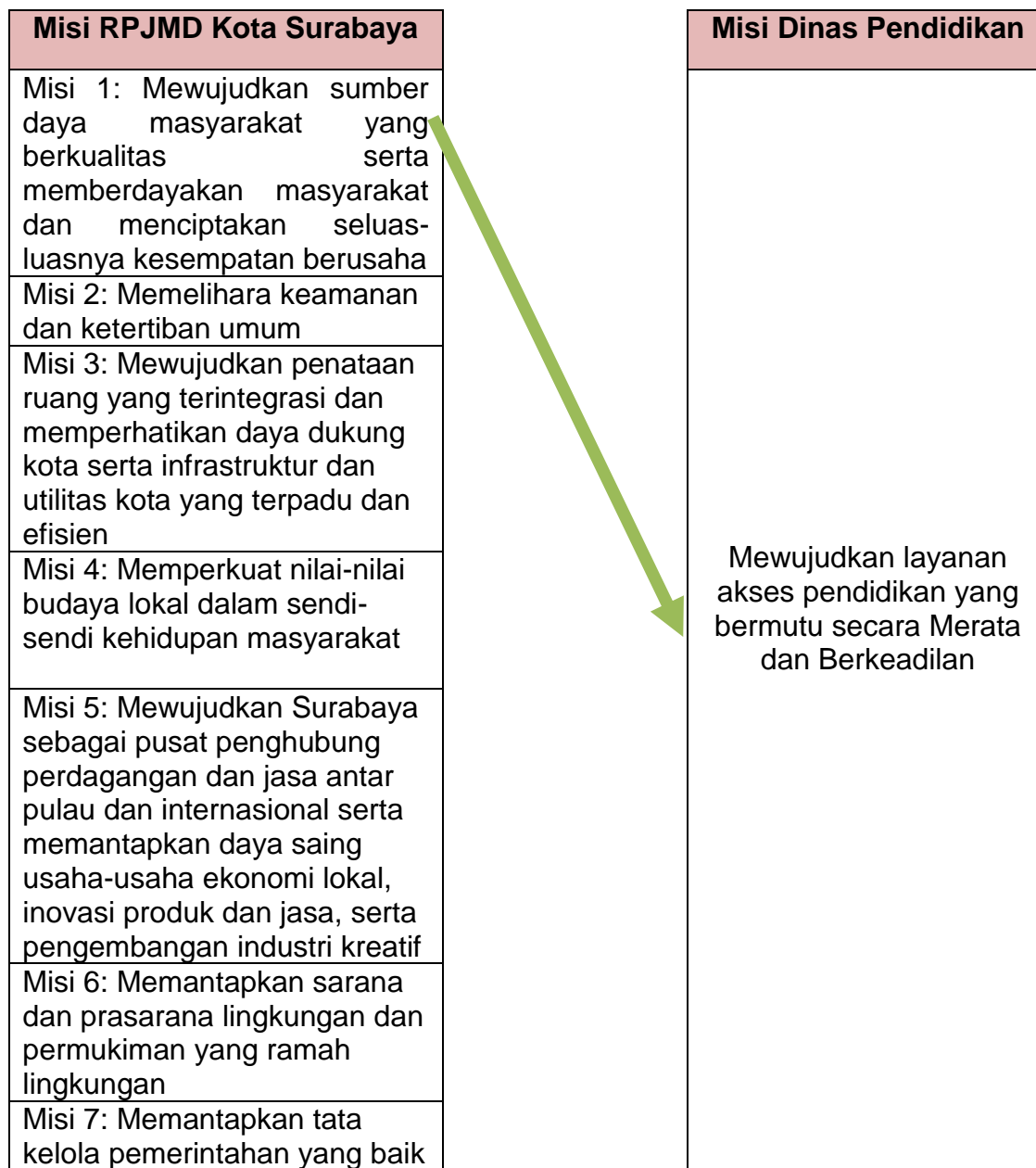
Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021		
	Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Visi : Terwujudnya Insan Yang Cerdas, Kreatif, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing Regional dan Global	Menjadikan Surabaya Sebagai <u>Barometer</u> Dan <u>Inspirator</u> Pendidikan Nasional	Barometer	Barometer yang dimaksud adalah pendidikan di Kota Surabaya dapat dijadikan standar penilaian ideal pendidikan yang ada di Indonesia.
		Inspirator	Inspirator yang dimaksud adalah bahwa pendidikan di Kota Surabaya dapat menjadi inspirasi pembangunan pendidikan di kota-kota lain di seluruh Indonesia.



Gambar 1.4
Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Tabel 1.4
Hubungan antara Visi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Visi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	Renstra Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021		
	Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Visi : Surabaya Kota <u>Sentosa</u> Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi	Menjadikan Surabaya Sebagai <u>Barometer</u> Dan <u>Inspirator</u> Pendidikan Nasional	Barometer	Barometer yang dimaksud adalah pendidikan di Kota Surabaya dapat dijadikan standar penilaian ideal pendidikan yang ada di Indonesia.
		Inspirator	Inspirator yang dimaksud adalah bahwa pendidikan di Kota Surabaya dapat menjadi inspirasi pembangunan pendidikan di kota-kota lain di seluruh Indonesia.



Gambar 1.5
Hubungan Antara Misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Pendidikan

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 5 bahwa Dinas Pendidikan Type A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16).

Peraturan yang memayungi penganggaran:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I.2.2. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota.

I.2.3. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Kota Surabaya disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

I.3. Maksud Dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Reviu Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan adalah:

1. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan pendidikan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks;
2. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang;
3. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Dinas Pendidikan jangka menengah (5 tahun);
4. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Dinas Pendidikan, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun 2010-2015 menjadi rencana strategis.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2019 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan tahun 2020-2021.

Adapun tujuan disusunnya Reviu Renstra Tahun 2019 adalah untuk: melakukan penyesuaian terhadap perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya Tahun 2016-2021

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika rencana strategis Dinas Pendidikan sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - I.1. Latar Belakang
 - I.2. Landasan Hukum
 - I.3. Maksud dan Tujuan
 - I.4. Sistematika Penulisan
- II. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 - II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
 - II.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan
 - II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
 - II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan
- III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan
 - III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
 - III.2. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
 - III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - III.5. Penentuan isu-isu strategis
- IV. Tujuan dan Sasaran
 - IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
- V. Strategi dan Arah Kebijakan
- VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

II.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

II.1.1.a. Uraian Tugas

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.1.1.b. Perubahan pada Perangkat Daerah

Tabel 2.1 Perubahan Nama Perangkat Daerah

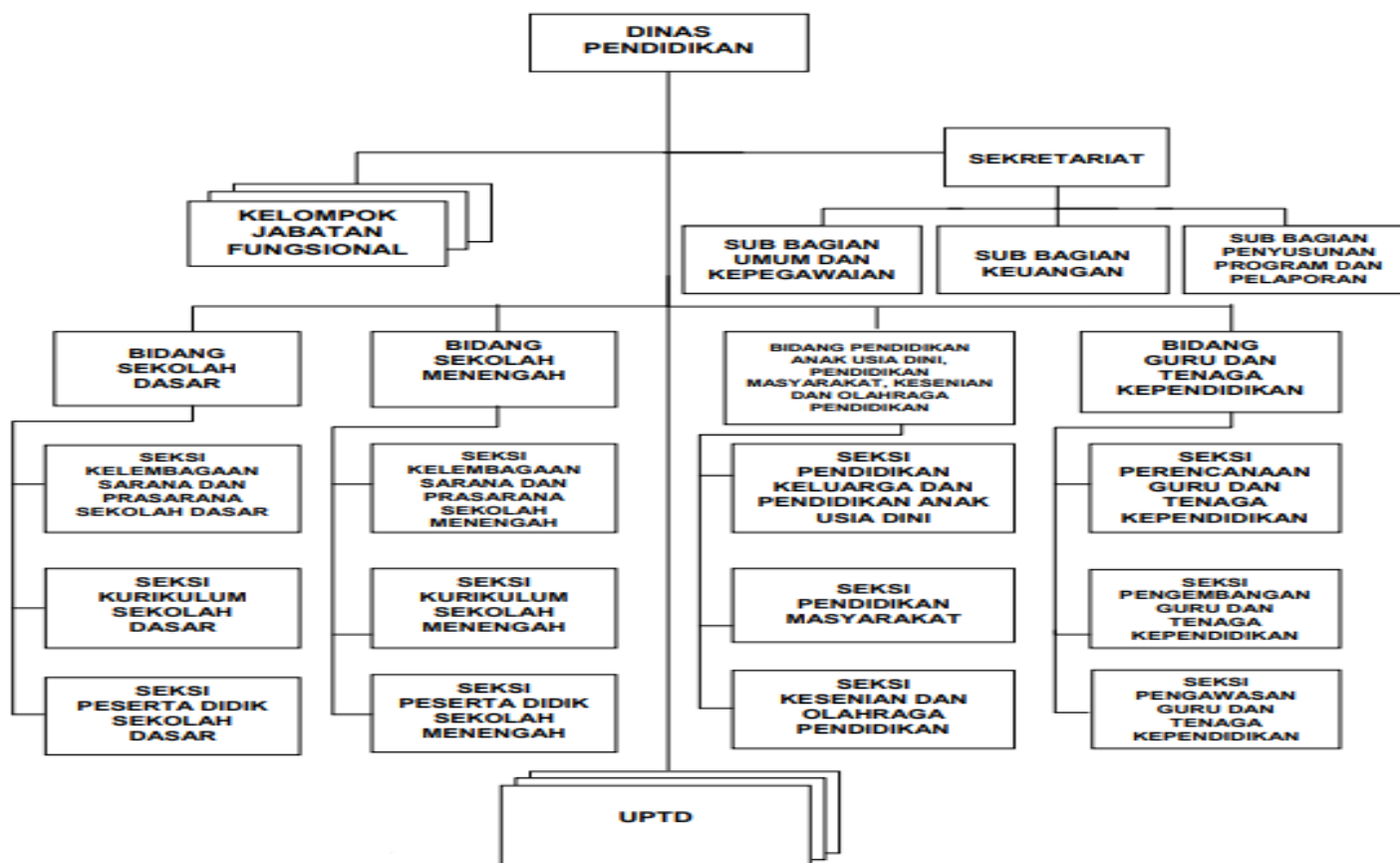
Uraian	Semula (Perwali Nomor 47 Tahun 2016)	Menjadi (Perwali Nomor 35 Tahun 2018)
Nama Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Nama Bidang	Sekretariat	Sekretariat
	Bidang Sekolah Dasar	Bidang Sekolah Dasar
	Bidang Sekolah Menengah	Bidang Sekolah Menengah
	Bidang PAUD, Dikmas, Kesenian dan Olahraga Pendidikan	Bidang PAUD, Dikmas, Kesenian dan Olahraga Pendidikan
	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
Nama Subbag/ Seksi	Subbag Umum dan Kepegawaian	Subbag Umum dan Kepegawaian
	Subbag Keuangan	Subbag Keuangan

Uraian	Semula (Perwali Nomor 47 Tahun 2016)	Menjadi (Perwali Nomor 35 Tahun 2018)
	-	Subbag Penyusunan Program dan Pelaporan
	Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar	Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
	Seksi Kurikulum Sekolah Dasar	Seksi Kurikulum Sekolah Dasar
	Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar	Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar
	Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah	Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
	Seksi Kurikulum Sekolah Menengah	Seksi Kurikulum Sekolah Menengah
	Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah	Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah
	Seksi Pendidikan Keluarga dan Pendidikan Anak Usia Dini	Seksi Pendidikan Keluarga dan Pendidikan Anak Usia Dini
	Seksi Pendidikan Masyarakat	Seksi Pendidikan Masyarakat
	Seksi Kesenian dan Olahraga Pendidikan	Seksi Kesenian dan Olahraga Pendidikan
	Seksi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	Seksi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
	Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Seksi Perencanaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	-	Seksi Pengawasan Guru dan Tenaga Kependidikan

II.1.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan terdiri dari Bidang Sekretariat, Bidang Sekolah Dasar, Bidang Sekolah Menengah, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Bidang PAUD, Pendidikan Masyarakat, Kesenian dan Olahraga Pendidikan.

Saat ini Dinas Pendidikan tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.1



Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar pelayanan publik;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- j. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- k. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- l. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l1. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dalam bidang pendidikan;
 - l2. pendayagunaan dan penyajian data statistik pendidikan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Rincian tugas Bidang Sekolah Dasar meliputi:

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
- b. penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang sekolah dasar;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sekolah dasar;

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sekolah dasar;
- e. pelaksanaan pendataan di bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
- f. pelaksanaan pemrosesan pemberian izin pendirian, perubahan serta penutupan izin satuan pendidikan sekolah dasar negeri;
- g. pelaksanaan perencanaan operasional program sekolah dasar sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri;
- j. pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan sekolah dasar sesuai kewenangannya;
- k. pemberian dukungan bantuan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan setara sekolah dasar;
- l. pelaksanaan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada sekolah dasar;
- n. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar;
- o. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sekolah dasar;
- p. pelaksanaan dan pemberian fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah dasar;
- q. pelaksanaan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah dasar;
- r. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada sekolah dasar;
- s. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah dasar;
- t. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana sekolah dasar;

- u. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan analisis penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah;
- v. pelaksanaan ujian sekolah dasar;
- w. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada sekolah dasar;
- x. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada sekolah dasar;
- y. pelaksanaan koordinasi, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan sekolah dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- z. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;
- aa. pelaksanaan pembinaan lembaga untuk mengikuti akreditasi, peningkatan mutu kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar;
- bb. pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan rencana program, petunjuk teknis proses pembelajaran dan penilaian sekolah dasar di bidang kurikulum;
- cc. pelaksanaan fasilitasi pengembangan potensi minat, bakat peserta didik;
- dd. pelaksanaan perencanaan dan pemberian fasilitasi biaya operasional sekolah dasar;
- ee. pelaksanaan penyediaan dukungan biaya operasional satuan sekolah dasar serta sederajat;
- ff. pelaksanaan pengawasan, pengendalian terkait proses perijinan pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar serta sarana dan prasarana, kurikulum, pembelajaran dan penilaian serta peserta didik sekolah dasar;
- gg. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sekolah dasar;
- hh. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ii. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- jj. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Sekolah Menengah meliputi:

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sekolah menengah;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sekolah menengah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sekolah menengah;
- e. pelaksanaan pendataan di bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah;
- f. pelaksanaan pemrosesan pemberian izin pendirian, perubahan serta penutupan izin, satuan pendidikan sekolah menengah;
- g. pelaksanaan perencanaan operasional program sekolah menengah sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah menengah negeri;
- j. pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan sekolah menengah sesuai kewenangannya;
- k. pelaksanaan pemberian dukungan bantuan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan setara sekolah menengah;
- l. pelaksanaan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada sekolah menengah;
- n. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah;
- o. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sekolah menengah;
- p. pelaksanaan dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan sekolah menengah;

- q. pelaksanaan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah menengah;
- r. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada sekolah menengah;
- s. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana sekolah menengah;
- t. pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana sekolah menengah;
- u. pelaksanaan ujian nasional sekolah menengah;
- v. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan analisis penyediaan biaya penyelenggaraan Ujian Nasional;
- w. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada sekolah menengah;
- x. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada sekolah menengah;
- y. pelaksanaan koordinasi, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan sekolah menengah dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- z. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;
- aa. pelaksanaan pembinaan lembaga untuk mengikuti akreditasi, peningkatan mutu kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah menengah;
- bb. pengawasan, pengendalian terkait proses perijinan pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah serta sarana dan prasarana sekolah menengah;
- cc. penyiapan bahan dan pemberian fasilitasi pengembangan potensi minat, bakat peserta didik;
- dd. perencanaan dan pemberian fasilitasi biaya operasional sekolah menengah;
- ee. pemberian dukungan biaya operasional satuan sekolah menengah serta sederajat;
- ff. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sekolah menengah;

- gg. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- hh. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- ii. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kesenian, dan Olahraga Pendidikan meliputi:

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan keluarga, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, kesenian dan olahraga pendidikan;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan keluarga, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, kesenian dan olahraga pendidikan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan keluarga, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, kesenian dan olahraga pendidikan;
- e. penyusunan perencanaan operasional program pendidikan keluarga, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, kesenian dan olahraga pendidikan;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di tingkat kota;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan Masyarakat (Perangkat Pembelajaran PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM));
- h. pelaksanaan proses administrasi pemberian izin pendirian/prinsip, perpanjangan ijin operasional serta penutupan izin satuan pendidikan / penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- i. pelaksanaan fasilitasi penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sesuai kewenangannya;
- j. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- k. pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- l. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi pendidikan anak usia dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- m. pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelembagaan, sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- o. pelaksanaan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- p. pelaksanaan pembantuan pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK);
- q. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
- r. pelaksanaan penyediaan biaya penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
- s. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- t. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- u. pelaksanaan penyediaan bantuan kepada pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- v. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

- w. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Satuan Pendidikan kerjasama (SPK) Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) dan Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dalam penjaminan mutu;
- x. pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
- y. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;
- z. pelaksanaan pengembangan minat bakat peserta didik bidang kesenian dan olahraga pendidikan;
- aa. pelaksanaan fasilitasi seleksi lomba kesenian dan olahraga pendidikan;
- bb. pelaksanaan pengelolaan UKS dan pengembangan lingkungan sekolah sehat;
- cc. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga;
- dd. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pendidikan keluarga;
- ee. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan keluarga;
- ff. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan keluarga, pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, kesenian dan olahraga pendidikan;
- gg. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- hh. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- ii. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan meliputi:

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan;

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pengendalian formasi guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan pemindahan dan penempatan guru dan tenaga kependidikan PNS sesuai kewenangannya;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
- h. pengawasan, penilaian kinerja dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
- i. pemberian rekomendasi pemberhentian guru dan tenaga kependidikan PNS;
- j. pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
- k. pemberian penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- m. pembinaan dan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

II.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di dinas, UPTD, maupun pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dibantu dengan pegawai kontrak yang terdiri dari admin, petugas keamanan dan petugas kebersihan.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Fungsi

Jumlah Pegawai	Fungsional Umum	Fungsional Pendidikan
Jumlah PNS	718	6.292

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2019

Adapun jumlah lembaga yang dikelola oleh Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Lembaga Yang Dikelola Dinas Pendidikan

Lembaga	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	2	1.338	1.340
KB	0	442	442
PPT	0	810	810
TPA	0	51	51
SD	302	379	681
SMP	63	272	335
MI	2	159	161
MTs	4	44	48
LKP	0	317	317
PKBM	0	32	32
Total	373	3844	4217

Sumber: SIMPAUD, Profil Sekolah Tahun 2019

II.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Pencapaian rencana strategis (renstra) Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra						Realisasi				Rasio Capaian pada Tahun			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		100%	61,34 %	64,56 %	65,93 %	67,37 %	68,89 %	70,50 %	64,16 %	66,60 %	66,36 %	66,36 %	104,60 %	103,16 %	100,65 %	98,50 %
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI			96,16 %	99,13 %	99,30 %	99,54 %	99,85 %	100,00 %	92,34 %	104,10 %	100,51 %	100,51 %	96,03 %	105,01 %	101,22 %	100,97 %
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs			88,25 %	90,98 %	91,13 %	91,35 %	91,64 %	91,99 %	85,14 %	102,40 %	91,23 %	91,23 %	96,48 %	112,55 %	100,11 %	99,87 %
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI		100%	92,67 %	95,54 %	95,69 %	95,69 %	96,23 %	96,59 %	83,75 %	95,96 %	95,72 %	95,72 %	90,37 %	100,44 %	100,03 %	100,03 %

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra						Realisasi				Rasio Capaian pada Tahun			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		100%	81,07 %	83,58 %	83,72 %	83,92 %	84,1 8%	84,50 %	81,07 %	92,33 %	83,81 %	83,81 %	100,0 0%	110,4 7%	100,1 1%	99,87 %
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0%	1,08%	1,00 %	0,93%	0,86%	0,79 %	0,73%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0%	1,08%	1,00 %	0,93%	0,86%	0,79 %	0,73%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100%	100,0 0%	100,0 0%	100%	100%	100, 00%	100,0 0%	100%	100%	100%	100%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
9	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100%	98,90 %	99,00 %	99,10 %	99,15 %	99,2 0%	99,25 %	99,97 %	101,0 1%	100%	100%	101,0 8%	102,0 3%	100,9 1%	100,8 6%
10	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs		100%	99,00 %	99,10 %	99,20 %	99,30 %	99,4 0%	99,50 %	105,51 %	95,89 %	94,51 %	94,51 %	106,5 8%	96,76 %	95,27 %	95,18 %

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra						Realisasi				Rasio Capaian pada Tahun			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi			21,66 %	23,90 %	26,14 %	26,52 %	27,9 7%	29,41 %	49,46 %	69,87 %	75,18 %	75,18 %	228,3 5%	292,3 4%	287,6 1%	283,4 8%
12	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi			9,49%	15,22 %	20,95 %	26,88 %	33,0 0%	39,33 %	13,04 %	13,62 %	27,27 %	27,27 %	137,4 1%	89,49 %	130,1 7%	101,4 5%
13	Pendidikan Dasar	100%				100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%			100,0 0%	100,0 0%
14	Pendidikan Kesetaraan	100%		100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%
15	Pendidikan Anak Usia Dini	100%		100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%	100,0 0%

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra						Realisasi				Rasio Capaian pada Tahun			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,31%	98,31%	92,94%	92,00%	98,31%	98,31%
18	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kinerja Dinas Pendidikan dapat dilihat dari capaian target indikator kinerja program (outcome)/kegiatan. Beberapa indikator yang tercapai sampai dengan tahun 2018 diantaranya:

1. Angka Partisipasi Kasar PAUD, SD/MI dan SMP/MTs;
2. Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs;
3. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs;
4. Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs;
5. Persentase Lembaga Pendidikan TK, SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi

Indikator no 1-4 tercapai didukung oleh fasilitasi pemberian biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar sederajat, bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SD negeri, fasilitasi pemberian biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah sederajat, bantuan operasional sekolah (BOS) untuk SMP negeri. Selain itu juga ada hibah BOPDA untuk sekolah swasta dan program pendidikan kesetaraan yaitu ujian nasional pendidikan kesetaraan paket A, B, C Setara SD, SMP, SMA.

Tercapainya indikator Lembaga Pendidikan TK, SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi didukung oleh kegiatan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah dasar dengan adanya pelaksanaan akreditasi sekolah dasar, peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah dengan adanya pelaksanaan akreditasi sekolah menengah, dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar PAUD.

Adapun beberapa indikator yang masih belum tercapai sebagai berikut:

1. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs.
Indikator ini tidak tercapai dikarenakan terdapat siswa SD/MI yang melanjutkan keluar kota.
2. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Indikator ini tidak tercapai dikarenakan adanya guru yang memiliki kualifikasi dibawah S1/D-IV, yaitu guru-guru yang sudah berusia tua yang tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target kinerja Dinas Pendidikan terhadap aksesibilitas pendidikan diantaranya yaitu pemberian biaya pendidikan daerah, pemberian biaya operasional sekolah dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				Rasio antara anggaran dan realisasi				Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	252.403.244.228	307.711.431.460	302.569.936.711	189.896.663.514	151.384.816.605	212.195.988.938	274.142.534.191	290.304.847.333	75.515.004.394	84,07%	89,09%	95,95%	39,77%	-9,32%	-12,97%
2	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	154.402.512.983	185.607.643.944	178.245.351.526	109.042.261.819	65.012.121.080	128.952.396.948	158.282.396.259	167.192.151.498	43.948.572.795	83,52%	85,28%	93,80%	40,30%	-15,74%	-15,11%
3	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	1.678.548.400	1.190.140.588	1.575.373.539	941.395.455	1.749.080.981	1.492.859.500	1.050.052.235	1.512.125.083	121.083.618	88,94%	88,23%	95,99%	12,86%	12,21%	-25,88%
4	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	45.685.238.995	58.546.091.047	46.185.978.370	19.255.599.730	10.613.904.931	39.038.649.198	52.221.597.526	40.295.808.039	844.204.328	85,45%	89,20%	87,25%	4,38%	-24,04%	-28,99%
5	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	2.472.008.577	63.994.436.135	22.623.968.686	15.699.941.966	10.386.130.396	2.286.680.000	51.276.944.178	22.000.375.336	714.342.061	92,50%	80,13%	97,24%	4,55%	589,92%	662,86%

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				Rasio antara anggaran dan realisasi				Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD		950.190.200	3.714.145.132	1.121.701.218			903.898.574	64.393.235	19.841.698		95,13%	1,73%	1,77%	30,27%	-54,02%
7	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	63.577.983.520	72.970.346.296	74.868.525.191	92.777.242.124	82.896.687.629	62.864.541.879	56.365.815.354	69.802.089.234	35.893.613.817	98,88%	77,24%	93,23%	38,69%	7,66%	-11,69%
8	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	36.000.000	253.825.768	250.826.294	111.599.999	118.800.000	20.347.770	222.570.198	223.788.796		56,52%	87,69%	89,22%	0,00%	138,71%	298,13%
9	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri				128.156.415.666	122.796.255.142				3.403.618				0,00%	-4,18%	
10	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri				67.163.241.124	61.324.155.142				3.403.618				0,01%	-8,69%	
11	Pemeliharaan sistem PPDB (Penerimaan				675.555.305					81.799.840				12,11%	-100,00%	

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				Rasio antara anggaran dan realisasi				Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Peserta Didik Baru)															
12	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan				1.728.237.000	1.764.164.000				-				0,00%	2,08%	
13	Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan				2.163.800.000	3.060.357.000				-				0,00%	41,43%	
14	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit	20.789.255.141	13.178.249.561	13.489.759.913	14.200.951.300	15.134.930.224	18.954.985.613	11.753.651.438	11.963.207.542	5.106.325.327	91,18%	89,19%	88,68%	35,96%	-5,60%	-31,18%

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				Rasio antara anggaran dan realisasi				Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	layanan disabilitas															
15	Fasilitasi Penyelenggara n Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	1.401.120.000	7.496.476.586	7.240.900.630	7.733.792.461	7.127.931.243	1.123.815.000	6.227.578.621	6.408.374.071	2.938.147.817	80,21%	83,07%	88,50%	37,99%	107,65%	134,30%
16	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	188.453.050	807.072.625	918.526.326	835.996.546	909.287.422	144.326.800	623.057.535	882.914.844	720.456.357	76,59%	77,20%	96,12%	86,18%	85,46%	118,34%
17	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	2.485.456.670	1.583.550.581	2.934.264.141	2.366.304.368	2.395.907.882	2.199.435.035	1.231.817.124	2.683.942.537	1.254.930.510	88,49%	77,79%	91,47%	53,03%	7,73%	6,88%
18	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar		2.107.607.310	1.061.957.055	524.803.435	552.026.742		826.542.014	830.875.994	110.129.728	-	39,22%	78,24%	20,98%	-31,67%	-43,11%
19	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah		243.601.070	202.930.923	403.258.923	434.243.142		113.654.890	178.205.631	111.131.161	-	46,66%	87,82%	27,56%	29,90%	9,58%

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				Rasio antara anggaran dan realisasi				Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD		490.600.223	481.962.257	430.094.688			469.413.520	399.233.022	305.504.941	-	95,68%	82,83%	71,03%	-37,51%	-19,21%
21	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	2.487.628.418	1.430.874.000	1.278.278.390	1.196.218.735	725.931.552	2.218.502.970	1.275.551.634	1.210.861.368	345.472.347	89,18%	89,14%	94,73%	28,88%	-24,72%	-39,68%
22	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	1.751.438.500	1.451.076.343	842.811.170	510.178.470	568.003.181	1.221.536.770	996.780.936	811.386.024	23.471.413	69,74%	68,69%	96,27%	4,60%	-21,80%	-44,70%
23	Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan		44.437.102.382	49.739.157.960	35.057.046.935	1.787.310.553		33.489.715.712	44.902.247.246	6.944.742.983	-	75,36%	90,28%	19,81%	-37,50%	-25,23%
24	Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	92.822.085.621	38.902.234.650	53.031.431.463	66.465.139.555	5.732.512.162	86.639.329.580	33.138.360.907	47.622.096.808	13.538.856.364	93,34%	85,18%	89,80%	20,37%	-21,95%	-29,87%
25	Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru	2.783.307.900	3.126.220.000	3.810.119.878	7.014.843.338	142.658.978.014	2.349.900.000	3.024.218.607	3.617.657.890	1.547.127.616	84,43%	96,74%	94,95%	22,06%	513,00%	-2,97%

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				Rasio antara anggaran dan realisasi				Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dan Tenaga Kependidikan															
26	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	38.551.301.100	35.048.712.858	34.584.087.388	39.529.521.768	37.966.894.742	32.895.314.330	32.222.592.207	32.713.047.999	15.907.255.301	85,33%	91,94%	94,59%	40,24%	-0,02%	-17,30%
27	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan				983.526.785	955.915.142				3.870.022				0,39%	-2,81%	
28	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1.379.576.950	2.832.375.716	3.751.088.932	493.512.308	5.494.814.292	1.214.075.640	2.004.357.235	3.068.330.709	95.859.958	88,00%	70,77%	81,80%	19,42%	266,08%	7,10%
29	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	2.711.840.060	1.975.465.113	2.043.980.976	1.467.302.838	1.470.306.492	2.416.350.900	1.647.607.311	1.912.541.402	425.945.158	89,10%	83,40%	93,57%	29,03%	-12,92%	-31,15%
30	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	1.698.030.000	922.556.664	513.865.492	676.094.675	1.739.824.642	837.721.960	532.236.079	495.178.668	515.640.490	49,33%	57,69%	96,36%	76,27%	24,73%	-13,10%
31	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	4.849.478.600	3.294.885.682	3.832.842.419	3.172.302.756	3.542.419.722	4.026.895.030	2.707.686.157	3.124.697.327	1.063.575.057	83,04%	82,18%	81,52%	33,53%	-5,32%	-27,77%
32	Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat		2.549.462.130	19.325.639.999	26.653.673.042	29.110.495.042		1.861.634.529	16.614.270.921	9.218.798.193		73,02%	85,97%	34,59%	235,05%	373,97%

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				Rasio antara anggaran dan realisasi				Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Pemberian Makanan Tambahan PAUD				3.379.59 2.168					1.344.24 1.098				39,78 %	-100,00%	
34	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah		512.934. 680	824.762.8 46	1.949.88 6.507	821.658.4 42		220.040. 117	753.91 8.381	170.630. 578		42,90 %	91,41 %	8,75 %	46,45%	82,63%
35	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	1.718.39 1.570	11.074.7 27.437	4.150.760 .983	5.185.48 2.663	5.218.626 .859	1.437.50 4.520	1.806.83 8.410	3.335.9 14.829	1.699.81 4.694	83,65%	16,31 %	80,37 %	32,78 %	126,88%	20,42%
36	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu		43.431.8 14.050	46.997.48 9.769	57.769.6 27.168	53.130.26 2.392		43.325.8 30.976	46.797. 275.07 5	23.947.5 23.645		99,76 %	99,57 %	41,45 %	7,70%	-20,41%
37	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga		284.153. 340	699.879.5 00	519.775. 778	967.168.7 72		218.944. 381	543.55 1.375	34.434.6 78		77,05 %	77,66 %	6,62 %	68,88%	27,30%
38	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	37.409.3 46.600	549.136. 796	1.011.402 .582	555.386. 903	815.214.0 32	36.958.1 63.740	497.080. 948	921.04 8.037	233.681. 945	98,79%	90,52 %	91,07 %	42,08 %	-3,16%	-29,33%
39	Pengembangan Kreativitas		1.123.15 4.760	913.190.9 72	464.427. 612			677.457. 197	841.88 1.372			60,32 %	92,19 %	0,00 %	-55,95%	-37,86%

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				Rasio antara anggaran dan realisasi				Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Budaya Daerah Sekolah Dasar															
40	Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah		551.368.381	386.131.880	287.913.210			310.838.148	367.100.864	23.475.045		56,38%	95,07%	8,15%	-51,80%	-37,75%
41	Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah		693.667.671	1.029.842.568	766.440.573			412.080.941	829.686.022	93.459.410		59,41%	80,56%	12,19%	-25,70%	6,30%
42	Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah		1.169.888.000	1.048.694.242	741.275.102			855.282.060	999.500.018	14.342.834		73,11%	95,31%	1,93%	-46,56%	-40,85%
43	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS		2.047.715.649	2.850.587.395	2.453.288.599	1.766.848.242		1.529.886.166	2.027.881.471	342.422.117		74,71%	71,14%	13,96%	-0,90%	-25,28%
44	Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah		316.547.480	497.775.414	334.414.925			145.560.349	406.743.492	3.870.022		45,98%	81,71%	1,16%	-25,19%	40,19%
45	Penyusunan Dokumen Perencanaan,		204.633.504	535.134.284	389.134.005	305.397.342		70.075.876	483.019.901	90.572.068		34,24%	90,26%	23,28%	37,57%	254,02%

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				Rasio antara anggaran dan realisasi				Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah															
46	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	6.940.090.193	7.488.820.684	6.610.279.348	11.584.699.292	21.622.238.201	6.257.852.894	6.047.727.203	5.996.508.811	2.991.560.195	90,17%	80,76%	90,71%	25,82%	39,52%	-18,11%
47	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	3.755.724.460	3.156.227.848	3.515.348.555	4.504.274.622	3.029.155.476	2.912.639.590	2.338.198.991	3.011.631.409	331.284.022	77,55%	74,08%	85,67%	7,35%	-2,30%	-26,64%
48	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	5.001.979.200					1.283.296.300				25,66%				-100,00%	
49	Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah	927.406.038					844.156.460				91,02%				-100,00%	
50	Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik	1.965.730.600					1.177.712.000				59,91%				-100,00%	

No	Uraian	Anggaran					Realisasi				Rasio antara anggaran dan realisasi				Pertumbuhan		
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	Penyelenggaraa n Pelatihan, Seminar, dan lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	3.663.52 1.240					2.701.59 8.350					73,74%				-100,00%	
	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik					226.814.0 00											
		755.536. 698.614	925.707. 019.212	900.188.9 91.099	929.333. 836.973	857.317.5 88.855	656.666. 577.715	787.068. 106.734	838.15 0.309.6 14	248.643. 822.881	86,91%	85,02 %	93,11 %	26,76 %	-9,32%	-12,97%	

II.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Analisa terhadap kondisi pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan sekolah dasar, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelolaan manajemen sekolah. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

II.4.1. Lingkungan Internal

a) Kekuatan (*strengths*)

1. Pemerataan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk semua jenjang;
2. Ketersediaan anggaran pendidikan melebihi alokasi minimal yang disyaratkan secara nasional;
3. Ketersediaan, kualifikasi dan kompetensi pendidik sesuai standar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
4. Kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan;
5. Sistem IT yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah;
6. Potensi siswa Surabaya.

b) Kelemahan (*weaknesses*)

1. Kesesuaian sarana dan prasarana pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan;
2. Pemenuhan pendidikan anak usia dini yang sesuai standar;
3. Kesesuaian jumlah, kualifikasi, dan kompetensi tenaga kependidikan dengan standar;
4. Optimalisasi fungsi penilik dan pengawas;

5. Pengawasan bagi lembaga pendidikan nonformal dan informal yang berizin;
6. Kesesuaian lembaga pendidikan anak usia dini dengan standar;
7. Akreditasi lembaga pendidikan nonformal dan informal.

II.4.2. Lingkungan Eksternal

a) Peluang (opportunities)

1. Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan dan kebutuhan pendidikan lifeskill;
2. Pemberian beasiswa dari Pemerintah untuk siswa miskin dan tenaga pendidik;
3. Dukungan pembiayaan untuk operasional pendidikan dari pemerintah.
4. Partisipasi dan dukungan dari stakeholder eksternal (perguruan tinggi, CSR, praktisi pendidikan, dewan pendidikan);
5. Pelimpahan kebijakan pendidikan informal dan nonformal provinsi ke kota.

b) Tantangan/ Ancaman (threats)

1. Banyaknya masyarakat yang tergolong dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi yang belum siap diterima oleh masyarakat Surabaya;
3. Penanaman pendidikan karakter bagi siswa agar siap menghadapi masa depan.
4. Tantangan global berupa industry 4.0 mengharuskan setiap siswa dan guru melek IT.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Gambaran dari kualitas pelayanan pendidikan di Kota Surabaya secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas penunjang pendidikan. Jenis fasilitas pendidikan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).

Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kualitas layanan pendidikan

Permasalahan mengenai kualitas layanan pendidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional;
2. Pemenuhan dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan;
3. Kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar;
4. Pendidikan yang mendorong daya inovasi dan kreativitas;
5. Pendidikan karakter dan pendidikan entrepreneur
6. Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan;

7. Sinkronisasi antara kurikulum di dunia pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

b. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan

Permasalahan mengenai ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Kerjasama penyelenggaraan pendidikan

Permasalahan mengenai kerjasama penyelenggaraan pendidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi pemerintah;
2. Keterbatasan dan kesenjangan kapasitas daerah dalam pengelolaan pendidikan;
3. Kerjasama dengan pihak luar negeri, dunia swasta, media serta pemerintah daerah dan stakeholder lainnya;
4. Keakuratan data pendidikan dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan SKPD)	(Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Data Pendidikan	Data sekolah/ lembaga Data siswa Data guru/tutor	Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi	Penyediaan system informasi yang handal dan akuntabel	Data dukung dari lembaga pendidikan	Kurangnya komitmen dari sekolah/lembaga untuk menyampaikan data yang akurat dan handal
Rasio guru dan murid	Rasio guru dan murid di beberapa sekolah belum seimbang	Standar Pelayanan Minimal	Melakukan distribusi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan	Rekrutmen guru di sekolah swasta di lakukan oleh pihak yayasan	Distribusi terhadap guru belum merata

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	<p>1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui index pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS)</p> <p>2. Zonasi pendidikan meliputi kualitas sarpras sekolah dan guru</p>	<p>1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui index pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS)</p> <p>2. Zonasi pendidikan meliputi kualitas sarpras sekolah dan guru</p>	<p>1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui index pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS)</p> <p>2. Zonasi pendidikan meliputi kualitas sarpras sekolah dan guru</p>

III.2. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi: Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas	Kualitas layanan pendidikan perlu ditingkatkan; Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional; 2. Saranan dan prasaran yang belum memadai. 3. Kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar; 4. Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan belum tertata baik; 5. Belum sinkronnya antara kurikulum di dunia pendidikan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. 2. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar. 3. Proses belajar mengajar yang berkualitas. 4. Pendidikan yang mendorong inovasi dan kreatifitas. 5. Pendidikan karakter dan entrepreneur. 6. Sinkronisasi anatara kurikulum di dunia

Visi: Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>kebutuhan kompetensi di dunia kerja.</p> <p>6. Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;</p> <p>7. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan kurang;</p> <p>8. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai.</p>	<p>pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.</p> <p>7. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.</p> <p>8. Penyediaan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>9. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.</p>

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

**“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN
BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”**

Makna dalam visi tersebut adalah :

Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah Pancasila.

Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Misi:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
4. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengemban misi 1 sebagai misi utamanya yaitu:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha.

III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Kualitas layanan pendidikan perlu ditingkatkan; Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas perlu ditingkatkan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional; 2. Saranan dan prasara yang belum memadai. 3. Kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar; 4. Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan belum tertata baik; 5. Belum sinkronnya antara kurikulum di dunia pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. 2. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar. 3. Proses belajar mengajar yang berkualitas. 4. Pendidikan yang mendorong inovasi dan kreatifitas. 5. Pendidikan karakter dan entrepreneur. 6. Sinkronisasi anantara kurikulum di dunia

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.</p> <p>6. Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;</p> <p>7. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan kurang;</p> <p>8. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai.</p>	<p>pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.</p> <p>7. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.</p> <p>8. Penyediaan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>9. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.</p>
8.	Melakukan revolusi karakter bangsa	Kesadaran dalam budaya membaca masih kurang	1. Rendahnya budaya baca di kalangan pelajar.	1. Menumbuhkan minat baca di kalangan pelajar melalui kegiatan wajib baca.
9.				

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan		2. Kesadaran terhadap nilai-nilai budaya local masih rendah.	2. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya abudaya lokal.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 1: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Kualitas layanan pendidikan perlu ditingkatkan; Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas perlu ditingkatkan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional; 2. Saranan dan prasaran yang belum memadai. 3. Kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar; 4. Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan belum tertata baik; 5. Belum sinkronnya antara kurikulum di dunia pendidikan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. 2. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar. 3. Proses belajar mengajar yang berkualitas. 4. Pendidikan yang mendorong inovasi dan kreatifitas. 5. Pendidikan karakter dan entrepreneur. 6. Sinkronisasi anatara kurikulum di dunia pendidikan dengan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kebutuhan kompetensi di dunia kerja. 6. Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang; 7. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan kurang; 8. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai.	kebutuhan kompetensi di dunia kerja. 7. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. 8. Penyediaan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. 9. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.

III.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Pendidikan

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui peningkatan indeks pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS)
2. Zonasi pendidikan, melalui:
 - Pemetaan dan redistribusi guru yang berkompeten dan berkualitas agar dapat merata dalam setiap zona;
 - Peningkatan kualitas guru di seluruh daerah di setiap zona;
 - Pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana sekolah;
 - Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Pemerintah Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

IV.1.1. Perumusan Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Dinas Pendidikan: **Meningkatkan kualitas pendidikan.**

IV.1.2. Perumusan Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran Dinas Pendidikan: **Terwujudnya Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.**

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun	
				2020	2021
	Tujuan Kota				
1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia		Indeks Pembangunan Manusia	80-81	80-81
		Sasaran Kota			
2		Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	79,23	80,16
	Tujuan OPD				
3	Meningkatkan kualitas pendidikan		Indeks Pendidikan	79,23	80,16
		Sasaran OPD			
4		Terwujudnya Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	11,12	11,28
			2. Angka Harapan Lama Sekolah	15,12	15,38
			3. APK PAUD	67,89%	68,89%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun	
				2020	2021
			4. APM SD/MI	96,23%	96,59%
			5. APK SD/MI	99,85%	100,00%
			6. APM SMP/MTs	83,90%	84,10%
			7. APK SMP/MTs	91,26%	91,45%
			8. Angka Kelulusan SD/MI	100,00%	100,00%
			9. Angka Kelulusan SMP/MTS	99,20%	99,25%
			10. Persentase Lembaga TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	65,13%	66,15%
			11. Persentase satuan pendidikan non formal yang terakreditasi	33,00%	39,33%
			Program Pengembangan Sekolah Dasar		
			1. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100,00%	100,00%
			2. Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	92,01%	93,19%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun	
				2020	2021
			3. Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/ provinsi/ nasional/internasional	0,12%	0,15%
			Program Pengembangan Sekolah Menengah		
			1. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100,00%	100,00%
			2. Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	95,73%	96,04%
			3. Persentase prestasi akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/ provinsi/ nasional/internasional	0,14%	0,30%
			Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan masyarakat dan kesenian olahraga pendidikan		
			1. Persentase ketuntasan pendidikan PAUD	78,50%	79,75%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun	
				2020	2021
			2. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	73,21%	74,29%
			3. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	89,27%	89,66%
			4. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	91,24%	91,37%
			5. Persentase ketuntasan pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan	72,25%	74,50%
			6. Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/ provinsi/ nasional/internasional	0,15%	0,20%
			7. Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/ provinsi/ nasional/internasional	1,70%	2,00%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun	
				2020	2021
			8. Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/ provinsi/ nasional/internasional	4,00%	4,50%
			9. Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	45,71%	46,12%
			Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan		
			1. Persentase guru PAUD yang kompeten	75,08%	82,23%
			2. Persentase guru SD yang kompeten	100,00%	100,00%
			3. Persentase guru SMP yang kompeten	100%	100%
			4. Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	100,00%	100,00%
			5. Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	85,00%	85,00%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun	
				2020	2021
			6. Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	90,00%	90,00%
			7. Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	100,00%	100,00%
			8. Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100,00%	100,00%
			Program Peningkatan Manajemen Sekolah		
			1. Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	81,68%	83,18%
			2. Persentase lembaga pendidikan SMP/ MTs yang tertib administrasi	87,38%	88,88%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

V.1. Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2020-2021 yaitu dijabarkan dalam table T-C.26.

VISI	: Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi		
MISI I	: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Strategi meningkatkan kualitas pendidikan formal	1. Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah 2. Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi; 3. Penyediaan biaya operasional pendidikan; 4. Pemberian bantuan biaya pendidikan anak sekolah; 5. Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah
		2. Strategi meningkatkan kualitas pendidikan non formal	Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat
		3. Strategi Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Pemberian biaya jasa pelayanan pendidik;

VISI	: Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi		
MISI I	: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
			3. Sertifikasi bagi pendidik;
		4. Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal	1. Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah;
			2. Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah.

V.2.1. Kebijakan Umum

Guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta derivasinya pada strategi Pembangunan Jangka Menengah Surabaya Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat dan terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut:

- a. Kebijakan pada perspektif masyarakat atau layanan akan ditekankan pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan menuju masyarakat yang sentosa secara merata dan berkeadilan. Penyediaan kebutuhan utama sandang, pangan dan papan yang didukung dengan pembangunan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain).
- b. Kebijakan pada perspektif proses internal akan diarahkan pada reformasi birokrasi menuju sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi

untuk menjamin kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kualitas layanan secara cepat, mudah dan terjangkau sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan diarahkan pada optimalisasi, fungsi koordinasi dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan diarahkan pada peningkatan dan optimalisasi kebijakan pendapatan daerah serta pengelolaan belanja daerah dan dana perimbangan dari pusat. Pengelolaan aset dan keuangan daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

V.2.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi misi kota melalui arah kebijakan dan strategi yang telah disebutkan dalam BAB VI maka disusunlah program yang merupakan pedoman bagi SKPD untuk merumuskan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, adapun strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Strategi meningkatkan kualitas pendidikan formal

Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan formal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a. Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah;
- b. Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi;
- c. Penyediaan biaya operasional pendidikan;
- d. Pemberian bantuan biaya pendidikan anak sekolah;
- e. Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2020 di dukung oleh Program Pengembangan Sekolah Dasar dan Program Pengembangan Sekolah Menengah. Indikator dari Program tersebut, antara lain:

- a. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI;
- b. Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar;
- c. Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional;
- d. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS;
- e. Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar;
- f. Persentase lembaga pendidikan SMP yang terakreditasi;
- g. Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional.

2. Strategi meningkatkan kualitas pendidikan non formal

Strategi meningkatkan kualitas pendidikan non formal dilaksanakan melalui kebijakan: Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2020 di dukung oleh Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan. Indikator dari Program tersebut, antara lain:

- a. Persentase ketuntasan pendidikan PAUD;
- b. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A;
- c. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B;
- d. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C;
- e. Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan;
- f. Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional;
- g. Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional;

- h. Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional;
- i. Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat.

3. Strategi Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Strategi meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Pemberian biaya jasa pelayanan pendidik;
- b. Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Sertifikasi bagi pendidik;

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2020 di dukung oleh Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan. Indikator dari Program tersebut, antara lain:

- a. Persentase guru PAUD jenjang TK yang kompeten;
- b. Persentase guru SD yang kompeten;
- c. Persentase guru SMP yang kompeten;
- d. Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten;
- e. Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas;
- f. Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas.

4. Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal

Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, antara lain:

- a. Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah;
- b. Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2020 di dukung oleh Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan dan Program

Peningkatan Manajemen Sekolah. Indikator dari Program tersebut, antara lain:

- a. Persentase guru SD yang berkualitas;
- b. Persentase guru SMP yang berkualitas;
- c. Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4;
- d. Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar;
- e. Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi;
- f. Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

VI.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatkan kualitas pendidikan													
	Terwujudnya Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A		86,25 %	127.066.124.151	87,10 %	129.030.169.879	87,10 %	256.096.294.030		
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B		89,27 %		89,66 %		89,66 %			
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C		91,24 %		91,37 %		91,37 %			
				Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan		72,25 %		74,50 %		74,50 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase ketuntasan pendidikan PAUD		78,50 %		79,75 %		79,75 %			
				Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional		0,15 %		0,20 %		0,20 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional		1,70 %		2,00 %		2,00 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional		4,00 %		4,50 %		4,50 %			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah		45,71 %		46,12 %		46,12 %			

		1.1.1.01.0 1.0010	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan		2 lemb aga	115.200.0 94	2 lemb aga	118.495.1 76	2 lemb aga	233.695.2 70	Dinas Pendidik an	Lembaga PAUD penerima DAK PAUD
		1.1.1.01.0 4.0001	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini		1337 lemb aga	5.121.980 .203	1337 lemb aga	5.164.051 .181	1337 lemb aga	10.286.03 1.384	Dinas Pendidik an	Pos Paud Terpadu (PPT) di Kota Surabaya
		1.1.1.01.0 4.0004	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan		18 kali	3.656.387 .982	18 kali	3.689.313 .764	18 kali	7.345.701 .746	Dinas Pendidik an	Kota Surabaya dan Luar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			n Luar Sekolah										Kota Surabaya
		1.1.1.01.04.0005	Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat		3 kali	25.468.978.889	3 kali	25.685.313.394	3 kali	51.154.292.283	Dinas Pendidikan	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya
		1.1.1.01.06.0001	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan		34 lembaga	3.465.396.807	34 lembaga	3.516.227.325	34 lembaga	6.981.624.132	Dinas Pendidikan	PKBM yang ditunjuk

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.1.1.01.07.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu		1200 orang	48.203.633.052	1200 orang	49.098.354.215	1200 orang	97.301.987.267	Dinas Pendidikan	TPA/TPQ hasil verifikasi dari Kemenag
		1.1.1.01.07.0002	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga		2 kali	506.424.163	2 kali	510.293.016	2 kali	1.016.717.179	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya
		1.1.1.01.07.0003	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM		289 lembaga	699.144.152	289 lembaga	705.594.790	289 lembaga	1.404.738.942	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.1.2.16.03.0006	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan		12 kali	1.914.070.606	12 kali	1.926.226.540	12 kali	3.840.297.146	Dinas Pendidikan	Seluruh lembaga sekolah di Kota Surabaya
		x.x.x.xx.xx.0013	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan		12.010 orang	37.914.908.203	12.010 orang	38.616.300.478	12.010 orang	76.531.208.681	Dinas Pendidikan	Lembaga PAUD di Kota Surabaya dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya
			Program Pengembangan Sekolah Dasar	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI		100,00%	303.929.882.126	100,00%	317.789.832.640	100,00%	621.719.714.766		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar		92,01 %		93,19 %		93,19 %			
				Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional		0,12 %		0,15 %		0,15 %			
		1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan		698 lembaga	151.342.500.743	698 lembaga	157.971.133.969	698 lembaga	309.313.634.712	Dinas Pendidikan	SD Negeri dan SD Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA
		1.1.1.01.01.0006	Peningkatan Perlengkapan	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar		301 lembaga	10.609.649.313	301 lembaga	10.994.011.691	301 lembaga	21.603.661.004	Dinas Pendidikan	SD Negeri di Kota Surabaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sekolah Dasar										
		1.1.1.01.01.0012	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan		301 lembaga	122.890.547.601	301 lembaga	129.491.961.801	301 lembaga	252.382.509.402	Dinas Pendidikan	SD Negeri di Kota Surabaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.1.1.01.01.0016	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan		10 lembaga	713.116.800	10 lembaga	749.832.039	10 lembaga	1.462.948.839	Dinas Pendidikan	Lembaga SD Negeri Penerima DAK Fisik Sekolah Dasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.1.1.01.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan		73 lembaga	12.537.956.655	73 lembaga	12.704.082.347	73 lembaga	25.242.039.002	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar Negeri penyelenggara Kelas Layanan khusus dan Sekolah Inklusi serta Pusat Layanan Disabilitas
		1.1.1.01.02.0004	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD		93864 orang	2.470.501.945	93864 orang	2.480.456.175	93864 orang	4.950.958.120	Dinas Pendidikan	Semua sekolah Dasar di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Ujian Sekolah
		1.1.1.01.02.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar		259 lembaga	775.968.018	259 lembaga	788.357.218	259 lembaga	1.564.325.236	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang mengikuti proses akreditasi
		1.1.1.01.02.0008	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar		669 lembaga	837.598.980	669 lembaga	844.886.386	669 lembaga	1.682.485.366	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sekolah Dasar										
		1.1.1.01.04.0002	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar		5 kali	1.752.042.071	5 kali	1.765.111.014	5 kali	3.517.153.085	Dinas Pendidikan	SD Negeri dan SD Swasta di Kota Surabaya
			Program Pengembangan Sekolah Menengah	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS		100,00%	153.840.443.138	100,00%	160.437.824.713	100,00%	314.278.267.851		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar		95,73 %		96,04 %		96,04 %			
				Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional		0,14 %		0,30 %		0,30 %			
		1.1.1.01.01.0004	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan		317 lembaga	72.786.168.805	317 lembaga	75.776.558.704	317 lembaga	148.562.727.509	Dinas Pendidikan	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA
		1.1.1.01.01.0007	Peningkatan Perlengkapan	Jumlah SMP yang menerima peningkatan		62 lembaga	9.662.884.033	62 lembaga	10.033.356.511	62 lembaga	19.696.240.544	Dinas Pendidikan	SMP Negeri di Kota Surabaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sekolah Menengah	perlengkapan sekolah menengah									
		1.1.1.01.01.0013	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan		62 lembaga	58.114.745.750	62 lembaga	61.130.233.451	62 lembaga	119.244.979.201	Dinas Pendidikan	SMP Negeri di Kota Surabaya
		1.1.1.01.01.0017	Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan		8 lembaga	2.163.800.000	8 lembaga	2.250.862.308	8 lembaga	4.414.662.308	Dinas Pendidikan	Lembaga SMP Negeri Penerima DAK Fisik Sekolah Menengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pendidikan										
		1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan		37 lembaga	7.593.786.798	37 lembaga	7.692.767.864	37 lembaga	15.286.554.662	Dinas Pendidikan	Seluruh Lembaga Sekolah dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya
		1.1.1.01.02.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah		40993 orang	836.732.942	40993 orang	845.991.766	40993 orang	1.682.724.708	Dinas Pendidikan	Semua Sekolah Menengah di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan Ujian Nasional

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.1.1.01.02.0006	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah		294 lembaga	457.117.588	294 lembaga	462.485.293	294 lembaga	919.602.881	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang mengikuti proses akreditasi/re akreditasi dan Lomba Budaya Mutu
		1.1.1.01.02.0009	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah		245 lembaga	501.583.402	245 lembaga	505.372.504	245 lembaga	1.006.955.906	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.1.1.01.04.0003	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah		1 kali	1.723.623.820	1 kali	1.740.196.312	1 kali	3.463.820.132	Dinas Pendidikan	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya
			Program Peningkatan Manajemen Sekolah	Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi		81,86 %	87.798.278.996	83,18 %	89.382.952.794	83,18 %	177.181.231.790		
				Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi		87,38 %		88,88 %		88,88 %			
		1.1.1.01.01.0005	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan		2 kali	1.980.465.828	2 kali	2.005.044.919	2 kali	3.985.510.747	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan lembaga SD Negeri dan SMP Negeri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													pelaksana PPDB
		1.1.1.01.01.0009	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan		363 lembaga	84.789.586.880	363 lembaga	86.343.895.410	363 lembaga	171.133.482.290	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri
		1.1.1.01.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah		2567 lembaga	1.028.226.288	2567 lembaga	1.034.012.465	2567 lembaga	2.062.238.753	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya
			Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga	Persentase guru PAUD yang kompeten		100,00%	147.221.921.409	100,00%	147.755.971.578	100,00%	294.977.892.987		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kependidikan										
				Persentase guru SD yang kompeten		100,00%		100,00%		100,00%			
				Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4		100,00%		100,00%		100,00%			
				Persentase guru SMP yang kompeten		100,00%		100,00%		100,00%			
				Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar		100,00%		100,00%		100,00%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas		85,00 %		85,00 %		85,00 %			
				Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas		90,00 %		90,00 %		90,00 %			
				Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten		100,00 %		100,00 %		100,00 %			
		1.1.1.01.03.0001	Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan		2 dokumen	54.966.772.542	2 dokumen	54.989.103.418	2 dokumen	109.955.875.960	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan		2031 orang	64.930.918.074	2031 orang	64.960.279.884	2031 orang	129.891.197.958	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya
		1.1.1.01.03.0003	Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan		957 lembaga	26.206.989.044	957 lembaga	26.685.332.615	957 lembaga	52.892.321.659	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya
		1.1.1.01.03.0006	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan		1 kali	1.117.241.749	1 kali	1.121.255.661	1 kali	2.238.497.410	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(APBD / BKK)										
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah													
	Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan												
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran		87,00 %	13.228.789.223	88,00 %	13.327.979.725	88,00 %	26.556.768.948		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.2.2.02.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran		100 %	13.228.789.223	100 %	13.327.979.725	100 %	26.556.768.948	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan
			Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran		100,00%	1.978.633.172	100,00%	1.992.850.957	100,00%	3.971.484.129		
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik		100,00%		100,00%		100,00%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.2.2.02.02.0039	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran		100 %	1.978.633.172	100 %	1.992.850.957	100 %	3.971.484.129	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan													
	Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan pembangunan												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		100,00%	693.460.788	100,00%	695.021.527	100,00%	1.388.482.315		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendataan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.1.2.01.02.0047	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah		12 dokumen	693.460.788	12 dokumen	695.021.527	12 dokumen	1.388.482.315	Dinas Pendidikan	Kantor Dinas Pendidikan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator		Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	2020	2021	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	
Tujuan Kota					
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80-81	80-81	80-81	80-81
Sasaran Kota					
Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	79.23	79.23	80.16	80.16
Tujuan OPD					
Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	79.23	79.23	80.16	80.16
Sasaran OPD					
Terwujudnya Satuan Pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	11.12	11.12	11.28	11.28
	2. Angka Harapan Lama Sekolah	15.12	15.12	15.38	15.38
	3. APK PAUD	67.89%	67.89%	68.89%	68.89%
	4. APM SD/MI	96.23%	96.23%	96.59%	96.59%
	5. APK SD/MI	99.85%	99.85%	100.00%	100.00%
	6. APM SMP/MTs	83.90%	83.90%	84.10%	84.10%
	7. APK SMP/MTs	91.26%	91.26%	91.45%	91.45%
	8. Angka Kelulusan SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	9. Angka Kelulusan SMP/MTS	99.20%	99.20%	99.25%	99.25%
	10. Persentase Lembaga TK, SD/MI, SMP/MTs yang terakreditasi	65.13%	65.13%	66.15%	66.15%
	11. Persentase satuan pendidikan non formal yang terakreditasi	33.00%	33.00%	39.33%	39.33%

Indikator		Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	2020	2021	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	
Program					
Program Pengembangan Sekolah Dasar	1. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	2. Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	92.01%	92.01%	93.19%	93.19%
	3. Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/ provinsi/ nasional/internasional	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
Program Pengembangan Sekolah Menengah	1. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	2. Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	95.73%	95.73%	96.04%	96.04%
	3. Persentase prestasi akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/ provinsi/ nasional/internasional	0.14%	0.14%	0.30%	0.30%
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan masyarakat dan kesenian olahraga pendidikan	1. Persentase ketuntasan pendidikan PAUD	78.50%	78.50%	79.75%	79.75%
	2. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	73.21%	73.21%	74.29%	74.29%
	3. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	89.27%	89.27%	89.66%	89.66%
	4. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	91.24%	91.24%	91.37%	91.37%

Indikator		Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	2020	2021	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	
	5. Persentase ketuntasan pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan	72.25%	72.25%	74.50%	74.50%
	6. Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional	0.15%	0.15%	0.20%	0.20%
	7. Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	1.70%	1.70%	2.00%	2.00%
	8. Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	4.00%	4.00%	4.50%	4.50%
	9. Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	45.71%	45.71%	46.12%	46.12%
Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase guru PAUD yang kompeten	75.08%	75.08%	82.23%	82.23%
	2. Persentase guru SD yang kompeten	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	3. Persentase guru SMP yang kompeten	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5. Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%

Indikator		Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	2020	2021	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	
	6. Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
	7. Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	8. Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Program Peningkatan Manajemen Manajemen Sekolah	1. Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	81.68%	81.68%	83.18%	83.18%
	2. Persentase lembaga pendidikan SMP/ MTs yang tertib administrasi	87.38%	87.38%	88.88%	88.88%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan pada tahun 2020-2021 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan akan disempurnakan menjadi dokumen Rancangan Renja.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Surabaya serta visi dan misi Dinas Pendidikan pada khususnya sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
196908091995011002